

**EKSISTENSI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA:  
IDEALISME ATAU BISNIS?**

*Nursanjaya*

*Dosen Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Malikussaleh*

*nursanjaya@gmail.com*

**Abstraks**

*Perguruan tinggi tidak hanya perlu dilihat sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat penelitian, dan pusat pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga suatu entitas korporat ‘penghasil ilmu pengetahuan’ yang perlu ‘bersaing’ untuk menjamin kelangsungan hidup. Persaingan, sebagaimana dialami oleh perusahaan profit, meliputi persaingan di bidang mutu, harga, dan layanan. Perguruan tinggi sebagai suatu entitas non-profit, menghadapi hal yang sama pula. Pengelolaan semuanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan manajemen, yaitu manajemen pendidikan tinggi.*

**Kata kunci:** eksistensi pendidikan tinggi, entitas non-profit.

**A. PENDAHULUAN**

Perguruan tinggi merupakan salah satu pranata yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Kelahiran dan perkembangannya tidak terlepas dari tuntutan dan cita-cita pembangunan nasional. Perguruan tinggi diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, yang membangun proses pembudayaan dan pemberdayaan komponen-komponen perguruan tinggi secara kreatif dan efektif serta menghargai adanya kemajemukan dalam masyarakat. Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi, berlaku budaya akademik dan kebebasan akademik dalam melakukan penelitian dan otonomi keilmuan. Dengan demikian, perguruan tinggi merupakan salah satu ujung tombak bagi *survive*-nya suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan

kompetisi global yang semakin kompleks. Perguruan tinggi sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional, memiliki misi umum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan sumber daya manusia, harus senantiasa mengacu pada kebutuhan yang ada dan mempersiapkan lulusannya untuk dapat mengisi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan baru sebagai dampak dari perubahan global. Untuk itu, perguruan tinggi harus berperan besar dan lebih aktif dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan IPTEKS dan IMTAQ. Sebab, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kemanusiaan serta pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Saat ini, penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dituntut untuk selalu berada dalam suasana tradisi ilmiah dan memberikan kebebasan penuh pada sivitas akademika untuk mengembangkan budaya akademik. Tradisi ilmiah dipahami sebagai kumpulan keyakinan, pengetahuan, dan adat kebiasaan yang dilestarikan karena sarat makna bagi sekelompok manusia dalam mengantisipasi arus modernisasi dan globalisasi. Karenanya, perguruan tinggi diharapkan mampu melakukan berbagai terobosan dalam rangka pengembangan budaya akademik dengan mempelajari kejayaan ilmiah pendidikan

klasik dan juga pendidikan kontemporer serta mengkombinasikan keduanya melalui berbagai penelitian atau melalui *human resources development*. Untuk itu, dibutuhkan adanya komitmen dan etos kerja ilmiah yang tinggi, cinta kebenaran, obyektif, terbuka, kritis dan moderat, sehingga perguruan tinggi diharapkan mampu mempublikasikan hasil-hasil temuan secara ilmiah yang dapat diterima oleh masyarakat serta menjadi barometer produktivitas bagi suatu perguruan tinggi.

## **B. PARADIGMA PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA**

Di Indonesia, pendidikan tinggi mengalami perubahan panorama selama dekade terakhir. Perubahan panorama yang dimaksud meliputi perubahan paradigma, pengelolaan, persaingan dan sebagainya. Perubahan paradigma terutama dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, sehingga teknologi *e-learning*, *e-university*, dan sejenisnya mulai banyak dibicarakan dan diusahakan. Begitu juga dengan perubahan pengelolaan menyangkut badan penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

Perguruan tinggi tidak hanya perlu dilihat sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat penelitian, dan pusat pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga suatu entitas korporat “penghasil ilmu pengetahuan” yang perlu “bersaing” untuk menjamin kelangsungan hidup. Persaingan, sebagaimana dialami oleh perusahaan profit, meliputi persaingan di bidang mutu, harga, dan layanan. Perguruan tinggi sebagai suatu entitas non-profit, menghadapi hal yang sama pula, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengeksistensikan dirinya.

Pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, istilahnya sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang

yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi, menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, dengan tujuan pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan, terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Kedua jenis pendidikan masing-masing, dibagi sebagai berikut:

1. Pendidikan Akademik: (a) Program Sarjana; (b) Program Pascasarjana; (c) Program Magister; dan (d) Program Doktor.
2. Pendidikan Profesional: (a) Program Diploma; (b) Program Diploma II; (c) Program Diploma III; dan (d) Program Diploma IV. (lihat UU Sisdiknas).

Ada beberapa komponen yang harus ada dalam konsep perguruan tinggi, yang kesemuanya itu menjadi tulang punggung tegaknya perguruan tinggi tersebut dalam menjalankan proses perkuliahan dan administrasi di dalamnya sebagaimana dipaparkan oleh Arief Furqan (2002), yaitu sebagai berikut: (1) Kurikulum; (2) Silabus; (3) Proses

pembelajaran; (4) Dosen; (5) Lingkungan belajar; (6) Fasilitas belajar; (7) Mutu input mahasiswa; (8) Dukungan biaya; dan (9) Kepemimpinan.

Sebagaimana di negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia merupakan negara yang tergolong baru dalam pengembangan pendidikan tinggi, yakni sekitar abad ke-20. Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia relatif masih muda, dimana sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia lahir setelah tahun 1950-an. Oleh karenanya, adalah sebuah kewajaran bila sampai sekarang pada umumnya perguruan tinggi di Indonesia masih dalam pencarian bentuk yang mapan dalam hal pengelolaan pendidikan tinggi.

Keberadaan perguruan tinggi merupakan salah satu pertanda peradaban suatu masyarakat. Masyarakat yang berperadaban cenderung mengembangkan berbagai institusi yang mampu menggali, mengembangkan, mengalihkan, dan menerapkan pengetahuan yang diperlukan untuk memajukan masyarakat tersebut (Sonhadji, 2012). Dengan demikian, perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pengembangan pengetahuan dan pembangunan masyarakat, merupakan suatumata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

Pada awalnya, perguruan tinggi hanya merupakan *a community of masters and students* (Kerr, 1982), yang titik berat kegiatannya pada pengajaran filsafat moral dan humanisme. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Yunani Kuno yang merupakan warisan *The Academi of Plato* dan *The Lyceum of Aristotle* sebagai perkembangan lanjut dari sekolah filsafat (Funk and Wagnalls New Encyclopedia, 1987). Pada saat itu, perguruan tinggi merupakan suatu institusi yang secara sadar mengabdikan pada pengembangan pengetahuan, pemecahan masalah, apresiasi kritis terhadap prestasi dan pelatihan pada tingkat yang benar-benar tinggi (Kerr, 1982).

Adapun bentuk mutakhir perguruan tinggi sekarang yang juga diadopsi oleh sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia adalah sebagai suatu “multiversitas” dalam arti suatu

institusi yang berisi berbagai masyarakat (*community*) dan kegiatan. Institusi ini terdiri atas masyarakat mahasiswa program sarjana dan pascasarjana, masyarakat humanis, masyarakat ilmuwan, masyarakat ilmuwan sosial, masyarakat profesional, masyarakat personel non-akademik, dan masyarakat administrator. Beragam kegiatan terdapat di dalamnya, mulai dari pengajaran, memajukan pengetahuan, meningkatkan metode riset yang canggih, memperluas kesadaran internasional, sampai pada pengabdian kepada masyarakat (Sonhadji, 2012).

Indonesia sendiri memahami hakikat perguruan tinggi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Pasal 19 ayat 1). Dengan dasar UUSPN ini, maka perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan begitu, perguruan tinggi berperan penting dalam pembangunan bangsa yang diharapkan, yaitu mendidik mahasiswa agar mampu meningkatkan daya potensinya melalui program akademik, profesi, dan/atau vokasi; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kajian dan penelitian; dan melakukan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan karakter yang sesuai dengan khazanah dan budaya bangsa.

Rifai (1986) menguraikan peranan perguruan tinggi dalam pembangunan di Indonesia sebagai berikut: (1) perguruan tinggi adalah pusat kreatif yang mengantisipasi masa depan dengan *sense of purpose*, *sense of mission*, dan *sense of commitment*, serta yang menyumbang kepada kemajuan intelektual dan sosial; (2) perguruan tinggi bukanlah pembela ide-ide usang, pusat konformitas intelektual, atau

sekelompok gedung tanpa jiwa; (3) pembangunan adalah pertumbuhan disertai perubahan yang mencakup segi-segi sosial, kultural, dan ekonomi, dan yang meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif; (4) proses modernisasi mensyaratkan perubahan-perubahan sosial dan psikologis dengan beberapa perangkat nilai yang lebih sesuai dengan keadaan politik, ekonomi, dan struktur sosial yang baru; (5) perguruan tinggi hendaknya mampu menghasilkan perancang perubahan (*change-designers*) dan pendorong perubahan (*change-pushers*) yang berjiwa *entrepreneur* dan *innovator*; dan (6) dalam proses modernisasi menuju masyarakat teknologi, perguruan tinggi memainkan peranan yang sangat aktif; serta tambahan dari Kotler (1995), manajemen lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga yang memberikan layanan atau *service* yang bermutu pada mahasiswa dan pelanggan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan harapannya.

### **C. EKSISTENSI PENDIDIKAN TINGGI: IDEALISME ATAU BISNIS?**

Pada umumnya, untuk melakukan suatu pekerjaan diperlukan kerjasama dengan orang lain serta dukungan sumberdaya manusia dan material. Semakin kompleks suatu pekerjaan, maka semakin dibutuhkan pendayagunaan sumberdaya manusia dan non-manusia secara efektif dan efisien. Proses inilah yang kemudian dikenal dengan istilah manajemen. Pada hakikatnya, manajemen berkenaan dengan cara-cara pengelolaan suatu lembaga agar lembaga tersebut berjalan efektif dan efisien. Suatu lembaga akan efisien apabila investasi yang ditanamkan di dalam lembaga tersebut sesuai atau memberikan profit sebagaimana yang diharapkan. Dan suatu institusi akan efektif bila pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang tepat dan benar sehingga berbagai kegiatan di dalam lembaga tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan. Sementara itu, pendidikan merupakan suatu proses transmisi budaya dalam rangka meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip manajemen

dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dengan beberapa asumsi: (1) kualitas sumberdaya manusia sebagai kunci kemampuan bersaing bangsa; (2) pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang paling efektif; (3) hanya pendidikan yang berkualitas yang dapat menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas; dan (4) pendidikan yang berkualitas harus diselenggarakan dengan manajemen pendidikan yang berkualitas (Sonhadji, 2012).

Di lingkungan pendidikan tinggi, muncul evolusi pemikiran bagaimana mengelola organisasi pendidikan, orientasi keberhasilan organisasi, dan pendekatan pembelajaran mahasiswa sejalan dengan perkembangan manajemen dan organisasi secara keseluruhan. Sebelumnya, pendidikan tinggi dengan lembaga-lembaganya dilihat sebagai suatu lembaga non-profit karena menyanggah tujuan-tujuan sosial. Oleh karena itu, sejak lama dunia pendidikan ditabukan dari analisis-analisis ekonomis dan profit. Namun, keadaan berubah seiring dengan perkembangan kemajuan zaman yang kian pesat. Masyarakat mulai menaruh perhatian besar terhadap eksistensi perguruan tinggi dengan menuntut kualitas dan akuntabilitas perguruan tinggi.

Tuntutan pengelolaan pendidikan tinggi agar lebih efektif dan efisien juga lebih diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Krisis, moneter, krisis ekonomi, adanya otonomi daerah, penyetaraan pendidikan, pembiayaan pendidikan tinggi yang kemudian dibebankan kepada lembaga pendidikan tinggi dengan adanya otonomi pendidikan tinggi, menjadikan lembaga pendidikan tinggi harus mencari alternatif bagi pembiayaan dan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang dikelolanya. Hal ini mengakibatkan banyaknya perguruan tinggi yang “terpaksa” mengubah visi dan misinya yang awalnya menganut idealisme menjadi berorientasi profit.

Selain itu, *university culture* yang selama ini menjadi ciri khas perguruan tinggi pun mengalami perubahan orientasi ke *corporate culture*.

Namun demikian, dalam upaya memperbaiki manajemen pendidikan tinggi, perlu disadari bahwa antara lembaga pendidikan tinggi idealisme dan lembaga pendidikan tinggi bisnis terdapat kesamaan dan juga perbedaan. Dalam mencari bentuk dan mengimplementasikan manajemen pendidikan tinggi di Indonesia, maka pemerintah dan juga pimpinan perguruan tinggi harus menyadari dampak dari kebijakan yang dimunculkan dalam memilih dan menetapkan manajemen pendidikan tinggi yang ada. Pendidikan dan bisnis adalah dua institusi yang juga sama-sama menginginkan efektivitas dan efisiensi dalam kinerja lembaganya. Pendidikan tinggi menginginkan agar *output* lembaganya mempunyai relevansi khususnya relevansi eksternal, begitu pula halnya dengan dunia bisnis yang juga menginginkan produknya mencapai sasaran.

Selain adanya persamaan, antara pendidikan tinggi dengan dunia bisnis juga terdapat perbedaan yang hakiki, terutama dalam visi dan misinya. Lembaga pendidikan tinggi mempunyai visi dan misi yang ideal sehingga para pelakunya mempunyai peranan dan fungsi yang spesifik. Dalam dunia pendidikan tinggi, para pelakunya adalah profesor (*who-profess*), mahasiswa (*students, who-study*) sedangkan komoditi yang menjadi obyek adalah ilmu pengetahuan (*knowledge*), sehingga melahirkan *university culture*. Sementara itu, dalam dunia bisnis, visi dan misinya ditentukan oleh profit, para pelakunya adalah manajer dan para pekerja yang berdasarkan pada keputusan-keputusan yang efisien, berorientasi pada kepuasan konsumen (*costumer satisfaction*), sehingga melahirkan apa yang disebut *corporate culture* (budaya perusahaan) yang intinya adalah produktivitas dan kualitas yang tinggi. Di dalam perkembangan ilmu manajemen modern, ada beberapa aliran atau prinsip manajemen modern yang juga merambah ke dunia manajemen pendidikan

tinggi hingga saat ini. Aliran-aliran tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Tilaar (2002), sebagai berikut: (1) Program Planning Budgeting System; (2) Management by Objectives; (3) Z-Based Budgeting; (4) Strategic Planning; (5) Benchmarking; (6) Total Quality Management/Continues Quality Improvement; dan (7) Bussiness Process Reengineering.

Namun berbagai efek negatif yang dibawa oleh serta oleh teori-teori dan prinsip manajemen modern tersebut juga harus menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan tinggi, karena: (a) tirani dari angka, terlalu percaya pada kekuatan kuantifikasi; (b) ilusi kepastian, cara berpikir kuantitatif dengan pengambilan keputusan yang sangat tradisional banyak sekali memberikan kepastian yang ilusioner; (c) menyederhanakan dan sekaligus mengkomplekskan masalah-masalah yang dihadapi dengan berbagai model yang sangat rumit; (d) mengurangi kompetensi manajerial yang berasal dari pengalaman sang manajer ke arah hafalan hukum dan teori manajemen; (e) menerapkan prinsip-prinsip manajemen dari dunia bisnis akan memperlemah komitmen terhadap pendidikan yang mempunyai visi dan misi yang khas; dan (f) teori-teori manajemen melahirkan *self-fulfilling prophecies*, yaitu mempercayai ramalan-ramalan yang telah dibuat sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka memindahkan prinsip-prinsip manajemen begitu saja dari dunia bisnis ke dunia pendidikan tinggi tanpa sikap kehati-hatian dan pertimbangan serta analisis yang matang, maka akan berakibat merugikan bahkan atau kegagalan dalam mencapai visi dan misi lembaga pendidikan tinggi. Sebaliknya, jika lembaga pendidikan tinggi menutup diri dari masuknya prinsip-prinsip yang positif dari dunia bisnis dapat berakibat pada penghamburan biaya rakyat dan orang tua oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang tidak efisien.

Karenanya, kehati-hatian dalam memilih bentuk-bentuk manajemen yang sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga sangat perlu diperhatikan, baik oleh pemerintah

maupun oleh lembaga pendidikan tinggi itu sendiri. Setidaknya, kita dapat belajar dari pengalaman ketika diberlakukannya PP No. 155 tahun 2000 mengenai pemberian otonomi pada 4 universitas, yaitu ITB, IPB, UI, dan UGM, yang lebih mirip Badan Usaha Milik Negara (BUMN) daripada BHMN dan menjadikan lembaga pendidikan tinggi tersebut tak ubahnya sebuah perusahaan yang berorientasi murni bisnis, murni profit.

#### **D. PENUTUP**

Eksistensi sebuah pendidikan tinggi di Indonesia saat ini diarahkan pada peningkatan mutu serta efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan tinggi. Karenanya, pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia sebagai kepanjangan tangan dari birokrasi pemerintah sudah saatnya diarahkan pada otonomisasi pendidikan tinggi dengan tidak meninggalkan visi dan misi yang ideal sebagai pendidikan tinggi milik masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya program yang lebih baik dalam mempertahankan eksistensi perguruan tinggi dan memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya dalam memajukan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern namun tetap memiliki kekhasan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang menganut azas egaliter dan kegotongroyongan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Brotowibowo, I. 1995. *Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Swadaya.
- Depdikbud. 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Djojonegoro, W. 1996. *Visi dan Strategi Pembangunan Pendidikan Untuk Tahun 2020, Tuntutan terhadap Kualitas*. Ceramah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kongres Nasional Pendidikan III IKIP Ujung Pandang, 4-7 Maret 1996. Ujung Pandang: IKIP Ujung Pandang.
- Donaldson, L., & Scanneli, E.E. 1979. *Human Resource Development: The New Trainer's Guide*. Canada: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Fattah, N. 2000. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Kerr, C. 1982. *The Uses of University*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Kotler, Philip; Karen F.A. Fox. 1995. *Strategic Marketing for Educational Institutions*. Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Lickona, T. 1991. *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect an Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Fajar. 2002. *Mahasiswa dan Budaya Akademik*. Bandung: Rineka Cipta. Muhadjir, N. 1997. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nursanjaya. 2010. Membangun Budaya Akademik Perguruan Tinggi: Studi Deskriptif terhadap Universitas Islam Tamiang. *Jurnal Epistemology*, Vol. I, Edisi 01, Januari-Juni 2010, hlm. 37-46.
- Nursanjaya. 2011. *Bunga Rampai Pendidikan: Wacana, Aplikasi, Implementasi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi*. 1999. Jakarta: Depdiknas.

- Rice, G.H., & Bishoprick, D.W. 1971. *Conceptual Models of Organization*. New York: Appleton-Century Crofts.
- Rifai, T.B. 1986. *Perspektif dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*. Jakarta: Gramedia.
- Siagian, S.P. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidi, I.D. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Paramadina.
- Sonhadji, A. 2012. *Manusia, Teknologi, dan Pendidikan: Menuju Peradaban Baru*. Malang: UM Press.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta: CV. Medya Duta.
- Winkel, W.S. 1991. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Gramedia.
- Witkin, B.R. 1984. *Assessing Needs in Educational and Social Programs*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, Inc.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.